

Sosialisasi Pilkada 2024 melalui pertunjukan Kesenian Irama Minang

Putri Diana, Hasrul, Al Rafni, Irwan

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Hasrul**

E-mail: hasrulpiliang1966@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2015-2024 di kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi perhatian serius bagi Komisi Pemilihan Umum setempat. Untuk mengatasi permasalahan ini, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengembangkan strategi sosialisasi dengan pendekatan budaya kearifan lokal, yaitu melalui pertunjukan Kesenian Irama Minang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yang terdiri dari Ketua KPU, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, staf lapangan, pendandang KIM dan masyarakat yang menghadiri kegiatan sosialisasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sementara uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan program sosialisasi pilkada melalui Pertunjukan KIM dimanfaatkan sebagai media penyampaian pesan-pesan politik secara komunikatif dan budaya. Nilai-nilai sosialisasi politik mencakup aspek edukasi, aspek partisipasi, dan aspek penguatan budaya lokal. Meski masih terdapat beberapa kendala teknis seperti terbatasnya fasilitas dan cuaca, KPU melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ini, seperti evaluasi berkala, digitalisasi media, dan penambahan kuota peserta. KIM menjadi pendekatan alternatif yang mampu menjangkau masyarakat secara kultural dan emosional dalam meningkatkan kesadaran politik pada Pilkada 2024.

Kata Kunci: sosialisasi politik, KIM, Pilkada 2024

ABSTRACT

This research is motivated by the low level of voter participation in the 2015-2024 regional elections in Lima Puluh Kota Regency, which has become a serious concern for the local General Election Commission. To address this problem, the Lima Puluh Kota Regency General Elections Commission (KPU) developed a socialization strategy with a local wisdom cultural approach, namely through the Minang Rhythm Art performance. The type of research used is a descriptive qualitative method. Informants in this study were determined by purposive sampling, consisting of the Chairman of the KPU, the Head of the Socialization Division, Voter Education, Community Participation and Human Resources, field staff, KIM

singers and the community who attended the socialization activities. Data collection techniques included interviews and documentation, while data validity testing was carried out by source triangulation. Data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Lima Puluh Kota Regency KPU implemented the election socialization program through the KIM Performance which was used as a medium for conveying political messages in a communicative and cultural manner. The values of political socialization include aspects of education, participation, and strengthening local culture. Despite several technical challenges, such as limited facilities and weather, the General Elections Commission (KPU) has implemented various efforts to improve the effectiveness of this activity, including regular evaluations, media digitization, and increasing the participant quota. KIM is an alternative approach capable of reaching the public culturally and emotionally to raise political awareness for the 2024 regional elections.

Keywords: political socialization, Minang rhythmic art, 2024 regional elections



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, yang salah satu perwujudannya melalui pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi. Pemilu yang berkualitas menuntut pemilih yang cerdas dan kritis, yang bisa tercapai jika pemilih memiliki kesadaran dan pemahaman politik (Rafni dan Suryanef, 2019: 68). Partisipasi tinggi terjadi jika masyarakat sadar akan hak memilihnya. Menurut Almond (dalam Nurbaiti, 2019: 13), kesadaran politik muncul saat seseorang memahami sistem politik. Sebaliknya, rendahnya partisipasi mencerminkan sikap apatis terhadap urusan pemerintahan (Putri, 2022: 2). Maka, penting membangun kesadaran pemilih agar mereka terdorong untuk menggunakan hak pilihnya, yang berpengaruh pada peningkatan partisipasi dan kualitas demokrasi. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya partisipasi politik dan memilih menjadi golput (Arip, 2024: 4). Golput adalah tindakan sadar untuk tidak memilih dalam pemilu. Selain itu, banyak pemilih belum memahami nilai hak suara mereka dan mudah terpengaruh politik uang serta kampanye negatif. Penurunan partisipasi politik menjadi masalah serius (Prasetyo dkk., 2022: 259), yang tercermin dalam data KPUD Lima Puluh Kota.

Tabel 1 Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015-2024

No.	Tahun	DPT	Tingkat Partisipasi Pemilih	Persentase Golongan Putih (Golput)
1.	2015	262.738	61,37%	39,03%
2.	2020	268.212	62,76%	37,24%
3.	2024	290.865	54,46%	45,50%

Sumber: Data KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015- 2024

Berdasarkan Tabel 1, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pilkada mengalami fluktuasi, dari 61,37% pada 2015 dengan golput 39,03%, naik menjadi 62,76% pada 2020, namun turun signifikan menjadi 54,46% pada 2024 dengan golput meningkat 45,50%. Angka ini jauh dari target partisipasi nasional sebesar 80%. Rendahnya partisipasi disebabkan oleh ketidakpercayaan, kurang pemahaman, dan ketidakpedulian masyarakat (Jayanti, 2024; Putri, 2022: 2). KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tanggung jawab meningkatkan partisipasi pemilih sebagaimana diamanatkan UU No. 15 Tahun 2011 (Putra, 2021: 4). KPU menjalankan program sosialisasi berdasarkan PKPU No. 10 Tahun 2018 dan Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya pendidikan pemilih yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal daerah.

KPU menggunakan pendekatan budaya lokal melalui pertunjukan KIM untuk menyosialisasikan pilkada. Kearifan lokal dipahami sebagai nilai, norma, dan adat yang mengatur kehidupan sosial (Suryanef, 2019: 69). Sosialisasi dengan KIM terbukti efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara emosional dan komunikatif. Ketua KPU dan Divisi Sosialisasi menyatakan bahwa KIM merupakan program unggulan yang menyenangkan dan mudah dipahami. Tingginya antusiasme masyarakat dalam setiap pertunjukan membuktikan efektivitas pendekatan budaya tersebut. Selain itu, hal tersebut didukung Kemajuan dan modernisasi serta laju pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan sosial, KIM yang pada zaman dulu digunakan untuk sarana permainan judi, pada zaman sekarang digunakan untuk sosialisasi KPU (syarifatul dkk;2025).

Pemanfaatan kearifan lokal ini memperlihatkan bahwa budaya dapat menjadi jembatan dalam komunikasi politik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, tetapi juga membangun kedekatan emosional antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Dalam kegiatan KIM, KPU juga menggandeng kelompok adat, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan seperti Bundo Kandung untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Langkah ini memperkuat legitimasi sosial dari program-program KPU dan menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini menunjukkan pentingnya strategi sosialisasi berbasis budaya dan pendekatan lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Hasan dkk. (2019) menyoroti keberhasilan program "Ciloteh Lapau" di Kota Pariaman sebagai media komunikasi budaya yang efektif dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemilu. Arip (2024) menekankan perlunya strategi sosialisasi yang adaptif dan kontekstual melalui pendidikan politik intensif dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap tempat pemungutan suara di Kabupaten Pesisir Barat. Yesi (2019) menunjukkan bahwa KPU Sumatera Selatan meningkatkan partisipasi melalui sosialisasi dan pendidikan pemilu yang berdampak pada legitimasi politik hasil pemilu. Sementara itu, Syamsuar (2018) mengungkapkan bahwa partisipasi politik di Kabupaten Takalar diperkuat oleh penerapan nilai-nilai kearifan lokal *siri' na pacce* seperti kejujuran dan kepatutan, yang berperan penting dalam optimalisasi proses pilkada berbasis budaya lokal.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu tentang upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, melalui berbagai program sosialisasi yang dilakukan seperti *Siri' Na Pacce* dan *Ciloteh Lapau*. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan yaitu belum ada penelitian terdahulu yang secara spesifik mengkaji tentang sosialisasi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui budaya kearifan lokal, terkhusus pertunjukan Kesenian Irama Minang KIM. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Sosialisasi Pilkada 2024 Melalui Pertunjukan Kesenian Irama Minang dengan melakukan studi Tentang Pendekatan Budaya Kearifan Lokal oleh KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007) serta Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono, 2020), yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata dan narasi, bukan angka. Lokasi penelitian berada di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang dikenal dengan kekayaan budaya lokal, khususnya dalam kesenian Minangkabau seperti pertunjukan KIM. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan delapan informan kunci, yaitu Ketua KPU, anggota divisi, staf lapangan, budayawan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan data primer berasal dari informan dan data sekunder dari dokumen resmi serta media daring. Analisis data mengacu pada tahapan Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Sosialisasi Pemilih Melalui KIM Sebagai Budaya Kearifan Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota

KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan sosialisasi pemilih melalui pertunjukan KIM sebagai bentuk pemanfaatan budaya lokal. Strategi ini bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Program dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Tahapan perencanaan meliputi rapat divisi, koordinasi antar divisi, penetapan KIM sebagai media sosialisasi, penentuan lokasi, dan koordinasi teknis dengan PPK, PPS, dan pihak lokal.

1) Perencanaan Program Sosialisasi pilkada 2024

Perencanaan program sosialisasi pemilih melalui pertunjukan Kesenian Irama Minang (KIM) oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan waktu, lokasi, serta kesesuaian dengan bentuk budaya lokal. Pendekatan budaya dipilih karena masyarakat di daerah tersebut masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi kolektif, sehingga penyampaian pesan politik menjadi lebih efektif. Rozi Wan dari KPU menyatakan bahwa pendekatan formal sering kurang efektif dalam menjangkau masyarakat, sehingga KIM dijadikan sebagai media sosialisasi yang lebih komunikatif dan akrab. Pertunjukan KIM yang bersifat kolektif dan menghibur dianggap mampu menjembatani antara informasi kepemiluan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di lima dapil yang memiliki aktivitas budaya tinggi. Berikut ini disajikan tabel 2 yang memuat lima lokasi dapil di Kabupaten Lima Puluh Kota yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi pertunjukan KIM.

Tabel 2 Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi KIM

No.	Nama Dapil	Wilayah Dapil	Lokasi Acara	Jadwal Acara
1	Lima Puluh Kota 1	Kecamatan Harau dan Payakumbuh	Kecamatan Payakumbuh	3 September 2024
2	Lima Puluh Kota 2	Kecamatan Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	24 Oktober 2024
3	Lima Puluh Kota 3	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Luak, dan Situjuh Limo Nagari.	Kecamatan Luak	4 Oktober 2024
4	Lima Puluh Kota 4	Kecamatan Akabiluru, Guguak dan Mungka	Kecamatan Guguak	14 September 2024

5	Lima Puluh Kota 5	Kecamatan Suliki, Gnung Omeh dan Bukik Barisan	Kecamatan Suliki	11 Oktober 2024
---	-------------------	--	------------------	-----------------

Sumber: KPU Kab.50 Kota (2024).

Meskipun pertunjukan KIM hanya diadakan di lima kecamatan tersebut, seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota terlibat secara aktif melalui dukungan koordinasi, mobilisasi massa, dan penyebaran informasi terkait Pilkada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program sosialisasi tidak hanya bersifat lokal, tetapi menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara kolaboratif. Kegiatan pertunjukan KIM dilaksanakan pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Untuk menjangkau lebih banyak khalayak, informasi juga disebarluaskan melalui media sosial, poster kegiatan, serta promosi hiburan dari pendatang KIM terkenal Junaidi BL dan berbagai hadiah menarik. Untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, KPU juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, terutama dalam bentuk poster digital yang memuat jadwal dan lokasi pelaksanaan sosialisasi. Berikut ditampilkan Gambar 1, yang berisi poster Program KIM sebagai bagian dari strategi komunikasi visual KPU kepada masyarakat.

Gambar 1 Poster Program KIM 2024



Sumber: Instagram @kpu50kota

KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota menyebarkan informasi sosialisasi KIM melalui media sosial dan poster yang mencantumkan waktu, lokasi, hiburan oleh Junaidi BL, serta hadiah menarik seperti kambing, sembako, dan peralatan rumah tangga. Media visual ini efektif menjangkau berbagai lapisan masyarakat karena memadukan informasi, hiburan, dan insentif. Materi sosialisasi yang disampaikan dalam pertunjukan KIM mencakup berbagai hal penting seperti urgensi menggunakan hak pilih, jadwal pelaksanaan Pilkada, serta

ajakan untuk menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Berikut disajikan Tabel 3 berisi informasi atau pesan-pesan yang disampaikan dalam sosialisasi pilkada melalui pertunjukan KIM:

Tabel 3 Pesan-Pesan Pilkada

Pesan Sosialisasi	Bentuk Penyampaian	Tujuan
Pentingnya hak pilih	Diumumkan di sela pertunjukan	Meningkatkan kesadaran memilih
Jadwal Pilkada	Disisipkan dalam lirik lagu Diumumkan di sela pertunjukan	Memberikan informasi aktual
Larangan golput	Disampaikan berulang dalam bait	Mengurangi angka golput

2) Pelaksanaan Sosialisasi Pertunjukan (KIM)

Setelah tahap perencanaan, pelaksanaan disusun secara sistematis, dimulai dari pembukaan resmi oleh KPU, sambutan pejabat daerah dan tokoh masyarakat, orasi singkat, hingga pertunjukan utama oleh pendandang KIM terkenal, Junaidi BL. Keterlibatan tokoh adat, ulama, dan pemuda menjadikan kegiatan ini lebih menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat. Pertunjukan KIM dikemas secara interaktif dan edukatif, menyampaikan pesan-pesan Pilkada dalam bentuk lagu yang mudah dipahami dan menarik perhatian. Berikut gambar antusias masyarakat dalam kegiatan.

Gambar 2 Antusias masyarakat



Sumber: @kpukab50kota (2024)

Gambar di atas menunjukkan antusiasme ratusan masyarakat dari berbagai kalangan yang memadati lokasi sosialisasi Pilkada 2024 oleh KPUD Kabupaten Lima Puluh Kota. Melalui koordinasi yang baik, para pendandang menyisipkan dan mengulang pesan-pesan pemilu dalam bait-bait lagu, seperti pentingnya menggunakan hak pilih, yang disampaikan secara komunikatif dan berulang. Strategi ini memperkuat daya ingat masyarakat serta membuat informasi lebih mudah dipahami karena disampaikan melalui media budaya yang akrab. Pelaksanaannya menggabungkan syair dan dialog dengan

melibatkan tokoh adat dan pemuda. Kegiatan ini mencerminkan komunikasi politik kolaboratif menurut pandangan Lasswell dan Geertz, serta menjangkau berbagai kalangan melalui media sosial dan hiburan tradisional. KIM menjadi sarana membentuk budaya politik sekaligus mengatasi apatisme, sebagaimana dijelaskan Almond, Powell, Radmila, dan Susiatiningsih. Program ini menjadi inovasi strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat secara kontekstual dan berkelanjutan

Nilai - Nilai Sosialisasi Politik Dalam Pertunjukan Kesenian Irama Minang

Nilai-nilai sosialisasi politik dalam pertunjukan KIM mencakup tiga aspek utama: aspek edukasi pemilu, partisipasi aktif masyarakat, dan penguatan identitas budaya sebagai media komunikasi politik.

a. Aspek Edukasi

Pertunjukan KIM mengandung nilai edukatif dengan menyisipkan pesan penting Pilkada melalui syair, pantun, kuis, dan permainan tradisional Minangkabau. Materi yang disampaikan meliputi jadwal Pilkada, pentingnya memilih, penolakan politik uang, tata cara mencoblos, serta pemimpin berintegritas. Ini sesuai dengan teori Surbakti (2010:117) dan Charles R. Wright (dalam Sutaryo, 2004:156), yang menekankan pendidikan politik sebagai proses pembentukan nilai dan perilaku politik masyarakat. Karna edukasi kepada masyarakat merupakan target atau (output) yang harus dapat terwujud agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dalam pelaksanaan pemilu dan kehidupan berdemokrasi (Masputri dkk; 2019). Contoh syair seperti:

*"Pai ka pasa mambali bada
Bada diserak-an ka dalam samak
Gunokan hak pilih jo sada
Pilih pemimpin nan bana bijak"*

Pergi ke pasar membeli ikan bada
Ikan disimpan di dalam wadah pandan
Gunakan hak pilih dengan bijaksana
Pilihlah pemimpin yang benar dan bijak

Syair ini mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bijak dalam Pemilu atau Pilkada. "*Pai ka pasa mambali bada*" mengandung arti tentang kembali ke pasar untuk membeli barang yang berguna, di mana "*bada diserak-an ka dalam samak*" mengingatkan kita untuk tidak membuang sesuatu yang berharga. Pemilih diminta untuk menggunakan hak pilih mereka secara bijak, memilih pemimpin yang tepat dan bijaksana.

b. Aspek Partisipasi

Pertunjukan KIM mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan menciptakan ruang interaktif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membangun kesadaran politik. Melalui pendekatan budaya yang akrab, masyarakat tidak hanya menjadi penonton pasif, melainkan turut terlibat secara emosional dan sosial dalam proses demokrasi. Kehadiran warga dalam kegiatan KIM menjadi bentuk awal partisipasi yang diharapkan berlanjut hingga ke tempat pemungutan suara. Hal ini selaras dengan Budiardjo (2008:49) dan Nice & Verba (dalam Surbakti, 2010) mengenai pentingnya partisipasi warga negara dalam proses politik. Suasana yang interaktif dengan hadiah simbolik memperkuat pemahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi. Rozi Wan, S.H.I. menekankan partisipasi ini sebagai bentuk kepemilikan masyarakat terhadap proses demokrasi. Contoh syair seperti:

Syair 1:

*"Hari alek sabanta lai,
Pilkada tibo indak lamo.
Mari kito barek-barek pai,
Milih pemimpin nan bijak samo"*

Hari pesta (demokrasi) tinggal sebentar lagi
Pilkada akan segera tiba
Mari kita bersama-sama pergi
Memilih pemimpin yang bijaksana

Syair tersebut mengandung ajakan kolektif untuk datang ke TPS secara bersama-sama. Kedua syair ini menekankan bahwa partisipasi dalam pemilu adalah kewajiban moral dan sosial yang harus dijaga demi memilih pemimpin yang bijak dan amanah.

Syair 2:

*"Ingek hari ingek tanggalnyo
Kito mamilih basamp samo
Mari gunokan hak suaro
Mamilih pemimpin kito
Hilang satu suaro kito
Karna golput ndak baguno"*

"Ingat hari ingat tanggalnya
Kita memilih bersama sama
Mari gunakan hak suara
Memilih pemimpin kita
Hilang satu suara kita
Karna golput tak berguna"

Syair ini mengingatkan masyarakat akan pentingnya mencatat tanggal pilkada dan menggunakan hak suara sebagai tanggung jawab bersama. Syair tersebut mengandung pesan ajakan kepada masyarakat untuk mengingat dan mencatat tanggal pelaksanaan pilkada agar tidak terlewatkan. Kandungan maknanya menekankan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum secara kolektif sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Ungkapan "Hilang satu suara kita" berfungsi sebagai peringatan bahwa satu suara yang tidak digunakan dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil akhir pemilihan kepala daerah.

c. Aspek Penguatan Budaya Lokal

KIM menjadi media sosialisasi politik sekaligus pelestarian budaya Minangkabau melalui penggunaan syair, pantun, dan irama tradisional. Clifford Geertz melihat budaya sebagai sistem simbol yang efektif dalam menyampaikan pesan politik, sedangkan teori kearifan lokal dari Radmila (dalam Suryanef, 2019:69) dan Susiatiningsih (2016:1) menekankan pentingnya pendekatan berbasis nilai lokal. Junaidi BL menyampaikan bahwa pesan melalui pantun lebih diterima masyarakat. Dengan KIM, KPU tidak hanya menyampaikan informasi politik tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal sebagai media demokratisasi

Kendala dan Upaya KPU dalam Pertunjukan KIM Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Kendala dalam Pertunjukan KIM

a. Keterbatasan Jumlah Kupon Peserta KIM

Pada pelaksanaan pertama pertunjukan KIM, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi kendala teknis berupa jumlah kupon peserta yang terbatas, hanya sekitar 2.000 lembar, sementara jumlah masyarakat yang hadir jauh melebihi itu. Hal ini menyebabkan sebagian warga tidak kebagian kupon, sehingga menimbulkan kekecewaan dan bahkan ada yang memilih pulang sebelum acara selesai. Masalah ini disampaikan langsung oleh Rozi Wan, S.H.I., Divisi Sosialisasi KPU, yang menegaskan bahwa keterbatasan kupon menjadi tantangan dalam mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi tersebut.

b. Keterbatasan alat

Gangguan teknis pada perangkat pendukung seperti sound system, panggung, dan pencahayaan kerap terjadi selama pelaksanaan sosialisasi KIM, yang berdampak langsung pada kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat. Satria Antomi, staf lapangan KPU, menjelaskan bahwa suara yang pecah dan kabel bermasalah membuat pesan-pesan sosialisasi sulit diterima dengan jelas, terutama di lokasi terbuka yang membutuhkan sistem suara yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas teknis menjadi faktor

krusial dalam menjamin efektivitas kegiatan sosialisasi politik berbasis budaya.

c. Cuaca

Kendala cuaca menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sosialisasi KIM, di mana hujan sering kali menyebabkan penundaan acara meskipun persiapan telah matang. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan terbuka dengan fasilitas tenda terbatas membuat masyarakat kesulitan mencari tempat berteduh saat hujan turun, sebagaimana terjadi di Nagari Andiang, Kecamatan Suliki. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti cuaca sangat memengaruhi kelancaran program sosialisasi berbasis budaya, terutama jika tidak diimbangi dengan infrastruktur pelindung yang memadai.

d. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan sosialisasi KIM yang berlangsung hingga dini hari menjadi tantangan tersendiri bagi panitia, seperti disampaikan Rozi Wan, S.H.I., karena kegiatan dimulai pukul 20.00 dan berakhir sekitar pukul 01.00–02.00 dini hari. Meskipun jadwal malam dipilih untuk menyesuaikan waktu luang masyarakat, durasi kegiatan yang panjang berdampak pada kelelahan panitia dari KPU dan PPK/PPS yang keesokan harinya tetap harus bekerja. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas dan semangat kerja mereka dalam menjalankan tugas lainnya.

Upaya KPU dalam mengatasi Kendala dalam Sosialisasi

a. Menambah Jumlah Kupon KIM

Permasalahan keterbatasan jumlah kupon pada pelaksanaan awal kegiatan KIM menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat karena tidak sebanding dengan jumlah peserta yang hadir. Menanggapi hal ini, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota segera melakukan evaluasi dan meningkatkan jumlah kupon pada pelaksanaan berikutnya. Rozi Wan, S.H.I. menyampaikan bahwa jumlah kupon ditambah dari 2.000 menjadi 4.000 sebagai respons terhadap tingginya antusiasme warga, guna menghindari kekecewaan dan memastikan seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang sama dalam kegiatan tersebut.

Gambar 3 Kupon KIM dan masyarakat yang bermain



Sumber: Instagram @kpu50kota

b. Pengecekan peralatan sebelum acara dan koordinasi dengan penyedia alat

Kendala teknis seperti kerusakan *sound system* cukup mengganggu kelancaran acara sosialisasi KIM. Oleh karena itu, penting bagi panitia untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap peralatan sebelum kegiatan dimulai serta menjalin koordinasi dengan vendor atau tim teknis lokal yang siap dengan peralatan cadangan. Satria Antomi, S.Ds., selaku staf lapangan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, menegaskan bahwa pada salah satu pelaksanaan di Suliki, kerusakan *sound system* memaksa panitia mencari pengganti di hari yang sama, menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan teknis sebagai bagian dari manajemen risiko kegiatan.

c. Cuaca

Dalam menghadapi kendala cuaca, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengupayakan penyediaan tenda tambahan untuk melindungi peserta dari hujan. Namun, keterbatasan anggaran membuat tenda tersebut tidak mencukupi bagi seluruh masyarakat yang hadir, sehingga sebagian memilih pulang. Hal ini menunjukkan perlunya strategi antisipatif yang lebih matang, seperti menyiapkan lokasi cadangan di ruang tertutup, penjadwalan ulang kegiatan saat cuaca ekstrem, atau mendokumentasikan kegiatan untuk disebarluaskan melalui media digital guna tetap menjangkau masyarakat yang tidak dapat hadir langsung.

d. Penyesuaian waktu Pelaksanaan dan koordinasi dengan pihak kecamatan

Meskipun pemilihan waktu malam hari dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat yang telah selesai beraktivitas, jadwal yang terlalu larut menimbulkan kelelahan bagi panitia penyelenggara. Untuk menjaga efektivitas kerja, perlu dipertimbangkan penjadwalan yang lebih seimbang, seperti memajukan waktu pelaksanaan atau memilih hari libur. KPU juga memperkuat koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan guna mendukung logistik dan SDM, serta mulai mempertimbangkan pemanfaatan teknologi seperti dokumentasi video dan live streaming sebagai alternatif penyebaran informasi tanpa harus menggelar kegiatan hingga dini hari.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan respons yang cepat dan adaptif melalui berbagai upaya perbaikan, kolaboratif, dan inovatif. Jumlah kupon ditambah menjadi 4.000 untuk menghindari kekecewaan dan mengakomodasi antusiasme masyarakat. Pengecekan alat dilakukan lebih menyeluruh sebelum acara dimulai, serta dilakukan koordinasi dengan penyedia atau vendor lokal untuk menyiapkan peralatan cadangan seperti *speaker portable*. Penyesuaian waktu dan jadwal kegiatan juga dilakukan agar lebih ringkas dan tidak menguras tenaga panitia, tanpa mengurangi substansi pesan politik. Selain itu, evaluasi

rutin dilakukan setelah setiap pertunjukan untuk menyempurnakan aspek teknis, logistik, dan strategi penyampaian. Seluruh upaya ini sesuai dengan pandangan Almond dan Powell (2010) mengenai pentingnya kesiapan media, agen, dan kondisi sosial dalam keberhasilan sosialisasi politik. Rush dan Althoff (2002:37) juga menegaskan bahwa efektivitas komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh kesiapan penyampai pesan, alat bantu, dan lingkungan sosial. Dengan strategi yang cepat dan adaptif tersebut, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil menjaga keberlangsungan KIM sebagai media sosialisasi politik berbasis budaya lokal secara inklusif dan partisipatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 melalui pendekatan budaya kearifan lokal, ditemukan bahwa sosialisasi dilakukan secara terencana melalui media pertunjukan KIM yang dilaksanakan di lima daerah pemilihan secara bergilir. Pertunjukan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh adat, pemerintah nagari, dan pemuda, dengan tujuan menjangkau masyarakat secara luas. KIM dipilih karena merupakan media hiburan tradisional yang masih populer dan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan pemilu.

Pertunjukan KIM memuat nilai-nilai sosialisasi politik yang meliputi aspek edukasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih, penolakan terhadap politik uang, serta dorongan untuk aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Aspek partisipasi yakni mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara langsung dalam pilkada. Selain itu, KIM juga memperkuat budaya lokal sebagai sarana komunikasi politik yang relevan dan membumi. Meski menghadapi kendala seperti keterbatasan logistik, gangguan teknis, cuaca, dan kelelahan jadwal, KPU berhasil menanganinya dengan respons strategis seperti penambahan kupon, perbaikan alat, dan penyesuaian jadwal.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (dalam Sulaeman, Z.). (2010). *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Arip, G. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Pesisir Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 (Studi pada Pemilu Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024) [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Damsar. (2010). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan, W., Asmawi, A., & Rasul, N. (2019). Komunikasi budaya dalam

- meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Pariaman. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 179–189.
- Jayanti, W. D., & Putri, V. M. (2024). Analisis perilaku golput di kalangan masyarakat dan aspek hukum golput dalam pelaksanaan pemilihan umum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 812–823.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota. (2024). *Klasifikasi berdasarkan umur daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota*. Diakses dari <https://kab-limapuluhkota.kpu.go.id>
- Masputri, M., Rafni, A., & Dewi, S. (2019). Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 (1), 67-75. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.109>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurbaiti, L. (2019). Kesadaran politik dan partisipasi politik: Pengaruh tingkat kesadaran politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula Kelurahan Tajur pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018 [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Edukasi Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.
- Prasetyo, N., Asrinaldi, A., & Zetra, A. (2022). West Sumatran political participation in the 2019 Presidential Election. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 259–268. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.852>
- Putra, H. A. (2021). Strategi KPU Jember dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2018 [Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq].
- Putri, A. S., & Putri, N. E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pada Pilkada Serentak Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Guguak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
- Radmila (dalam Suryanef, S.). (2019). PKM pengembangan layanan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik pada KPU kota Bukittinggi. *Jurnal Penerapan IPTEKS*, 1(2), 23–29.
- Rafni, A., & Suryanef, S. (2018). Model pengembangan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik berkelanjutan berbasis kearifan lokal (Studi di KPU Kota Bukittinggi dan KPU Provinsi Sumatera Barat).
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryanef, S. (2019). PKM pengembangan layanan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik pada KPU kota

- Bukittinggi. *Jurnal Penerapan IPTEKS*, 1(2), 23–29.
- Susiatiningsih, H. (2016). Kearifan lokal dalam pemilihan umum kepala daerah langsung. *Forum*, 40(2), 1–5.
- Sutaryo. (2004). *Dasar-dasar sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuar. (2018). Penerapan kearifan lokal Siri' Na Pacce dalam Pilkada Kabupaten Takalar 2017 [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Syarifatul Hayanis, U., S, N., Moeis, I., & Fatmariza, F. (2025). Kebertahanan kearifan lokal upacara adat Seren Taun di Kampung Adat Urug Bogor. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Politik*, 5 (2), 253-260. <https://doi.org/10.24036/jecco.v5i2.701>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

JECO